

**Judul** : Soal kerusuhan negeri Mullah, DPR minta keselamatan WNI di Iran diprioritaskan  
**Tanggal** : Selasa, 13 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 5

Soal Kerusuhan Negeri Mullah

# DPR Minta Keselamatan WNI Di Iran Diprioritaskan

Aksi demonstrasi besar-besaran di Iran mendapat perhatian serius dari kalangan Senayan. Para wakil rakyat meminta Pemerintah Indonesia memprioritaskan keamanan dan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI).

ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengatakan, keamanan dan keselamatan WNI adalah prioritas utama. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus memastikan seluruh warga yang tinggal di negeri para Mullah itu dalam kondisi aman dan terlindungi.

"Eskalasi demonstrasi di Iran yang semakin memanas dan mencemak tidak boleh dianggap remeh, terutama bagi keselamatan WNI yang berada di wilayah rawan konflik," ucap Soleh dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).

Diketahui, kerusuhan yang terjadi selama 10 hari di Iran terus meluas hingga menyebabkan lebih dari 500 orang meninggal dunia. Pemerintah Iran telah menetapkan masa berkabung selama tiga hari untuk menghormati warganya yang tewas.

Soleh meminta Kemlu bergerak cepat melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran dengan melakukan pemetaan lokasi para diaspora itu. Pastikan WNI tidak ada yang berada di titik-titik demonstrasi yang berbahaya. "Jangan sampai ada korban dari warga kita," ujar politikus PKB ini.

Kemlu desak dia, juga harus memperkuat komunikasi darurat, dan menyiapkan langkah-langkah perlindungan maksimal. Seperti rencana kontinjensi, termasuk kemungkinan evakuasi apabila situasi keamanan terus memburuk.

Langkah antisipatif itu sangat penting untuk mencegah risiko yang tidak diinginkan. Jangan menunggu situasi semakin buruk. "Negara harus hadir dan sigap



Oleh Soleh

melindungi warganya di luar negeri," tandas mantan anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) ini.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menambahkan, situasi yang terjadi di Iran tentu menjadi perhatian serius semua pihak, khususnya terkait keselamatan dan keamanan WNI. Perlindungan warga yang berada di luar negeri merupakan mandat konstitusional yang harus dijalankan secara optimal oleh Kemlu.

"Dalam kondisi yang penuh gejolak seperti sekarang, Kem-

lu harus segera melakukan langkah-langkah antisipatif dan koordinatif," desak Dave dalam keterangannya, Senin (11/1/2026).

KBRI di Teheran perlu aktif melakukan pemantauan situasi secara real-time serta membuka saluran komunikasi darurat bagi seluruh WNI. Inventarisasi jumlah dan lokasi warga perlu segera dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko secara cepat.

"Apabila eskalasi semakin meningkat, opsi evakuasi terukur juga harus dipersiapkan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan prosedur diplomatik yang berlaku," saran politikus Golkar ini.

Selain itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi mitigasi keamanan kepada seluruh WNI yang berada di Iran. Seperti imbauan untuk menghindari titik-titik keramaian, menjaga dokumen perjalanan tetap aman, serta selalu berkoordinasi dengan KBRI.

"Langkah ini bukan hanya bentuk tanggung jawab negara, tetapi juga wujud nyata keha-

diran Pemerintah dalam melindungi setiap warga di manapun mereka berada," kata legislator asal DKI Jakarta ini.

Komisi I DPR, lanjutnya, akan terus mengawasi dan mendorong agar Kemlu dan KBRI Teheran menjalankan tugasnya secara sigap, terukur, dan penuh tanggung jawab. Karena keselamatan WNI adalah prioritas utama.

"Negara harus senantiasa hadir dalam menghadapi dinamika keamanan internasional yang berpotensi mengancam mereka," tandasnya.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlindungan WNI Kemlu Heni Hamidah memastikan, sebanyak 386 WNI di Iran berada dalam kondisi aman di tengah gelombang demonstrasi besar-besaran di negara tersebut. "Sejauh ini belum ada laporan WNI yang terdampak. Kondisi masih baik," ujar Heni dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).

Heni membeberkan berdasarkan data per Juni 2025, jumlah WNI di Iran sebanyak 386 orang. ■ TIF